



Katalog BPS : 7203002.72

Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
SULAWESI TENGAH
2013**



BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH

STATISTIK KEUANGAN DAERAH SULAWESI TENGAH 2013

Katalog : 7203002.72
ISBN : 979 480 921 7
No. Publikasi : 72000.1308
Ukuran Buku : 21 x 28 cm
Jumlah Halaman : vii + 44 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disajikan secara series untuk tahun anggaran 2009 - 2011, merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Data yang disajikan dalam penerbitan ini meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumber utama data berasal dari laporan Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan laporan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 - 2011.

Disadari sepenuhnya, bahwa data yang disajikan masih mempunyai berbagai kelemahan walaupun telah disiapkan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai data sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada penerbitan mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terselesaikan tepat waktu Kami ucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga Kami sampaikan secara khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah membantu menyediakan data.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkannya.

Palu, April 2013

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Johanes De Britto Priyono, MA
NIP. 195909161985011001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data	2
1.3. Konsep dan Definisi	3
II. ULASAN RINGKAS	
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota	6
2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota	13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 – 2011	21
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 – 2011	22
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2009 – 2011	23
Tabel 4. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2009 – 2011	24
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2009 – 2011	25
Tabel 6. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2009 – 2011	26
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2009 – 2011	27
Tabel 8. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2009 – 2011	28
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2009 – 2011	29
Tabel 10. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2009 – 2011	30
Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 – 2011	31
Tabel 12. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 – 2011	32
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2009 – 2011	33

Tabel 14. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2009 – 2011	34
Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2009 – 2011	35
Tabel 16. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2009 – 2011	36
Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2009 – 2011	37
Tabel 18. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2009 – 2011	38
Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2009 – 2011	39
Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun Anggaran 2009 – 2011	40
Tabel 21. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2009 – 2011	41
Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2009 – 2011	42
Tabel 23. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2009 – 2011	43
Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2009 – 2011	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 – 2011	5
Gambar 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 – 2011	6
Gambar 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2011	7
Gambar 4.1. Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kep. Banggai dan Morowali Tahun Anggaran 2011	8
Gambar 4.2. Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kab. Poso, Donggala dan Tolitoli Tahun Anggaran 2011	9
Gambar 4.3. Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011	11
Gambar 4.4. Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Kota Palu Tahun Anggaran 2011	12
Gambar 5. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2011	14
Gambar 6.1. Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kep. Banggai dan Morowali Tahun Anggaran 2011	15
Gambar 6.2. Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Tolitoli Tahun Anggaran 2011	16
Gambar 6.3. Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011	17
Gambar 6.4. Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Kota Palu Tahun Anggaran 2011	18

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia semakin mempertegas kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perimbangan keuangan dimaksudkan untuk menjaga dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Dengan segala kewenangan dan sumber keuangan yang memadai diharapkan pemerintah daerah lebih dapat leluasa dalam merencanakan pembangunan dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional menuju cita – cita bersama yaitu mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah dengan asas transparansi dan akuntabel melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara bahwa perhitungan perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan sekaligus kegunaan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun ditingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Untuk mengetahui potensi dan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi diperoleh dari Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk Daerah Kabupaten/kota, diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten/Kota (PPKAD).

Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dipindahkan oleh petugas statistik kedalam daftar K-1 dan K-2 yang telah dipersiapkan dari BPS Pusat. Periode data yang dicakup dalam sajian ini adalah tahun fiskal/anggaran yang terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

1.3. Konsep dan Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari ; bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung disusun oleh belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

II. ULASAN RINGKAS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator dan pelayan masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memajukan suatu daerah sangat tergantung kebijakan pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, APBD dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

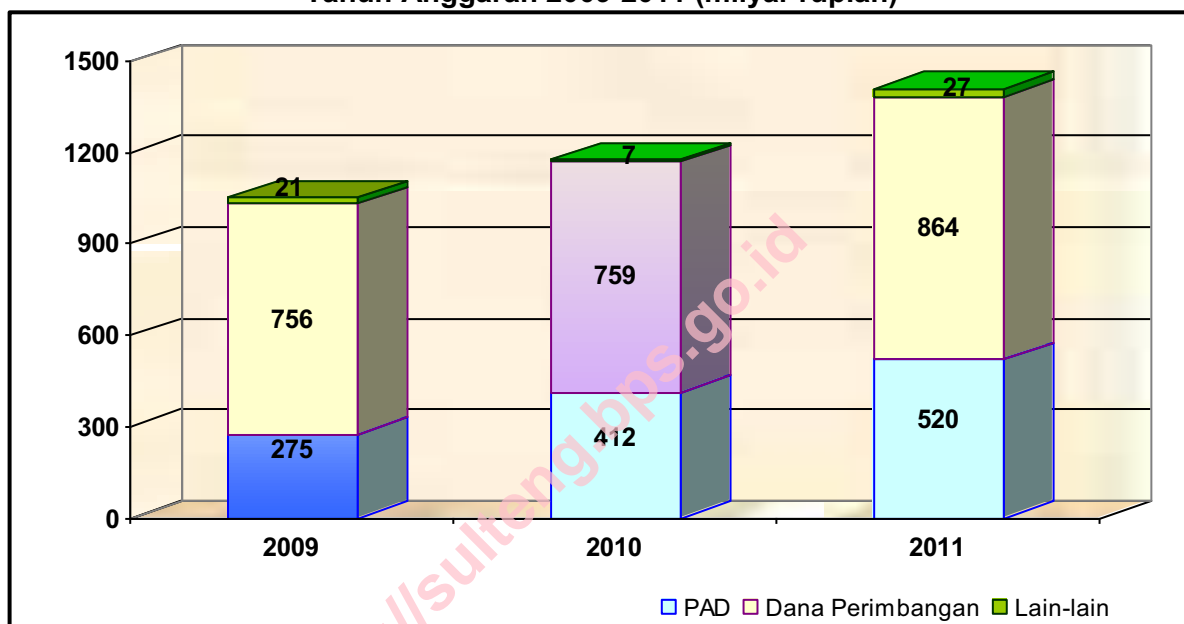
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya bagian Dana Perimbangan sebagai komponen terbesar Pendapatan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Belanja Daerah terdiri dari bagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komposisi Belanja Daerah dapat menunjukkan prioritas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011 tercatat sejumlah 1.410,6 milyar rupiah atau meningkat 19,78 persen dari tahun 2010. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11,90 persen. Pesatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya peningkatan realisasi bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 26,27 persen. Pada saat yang sama bagian Dana Perimbangan tumbuh sebesar 13,82 persen, namun tidak menggeser peranannya sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Daerah yang mencapai sebesar 61,26 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2011. Lebih lanjut, Dana

Alokasi Umum (DAU) sejumlah 743,16 milyar rupiah yang berasal dari pemerintah pusat memiliki andil sebesar 52,68 persen terhadap total Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011.

Gambar 1.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2009-2011 (milyar rupiah)

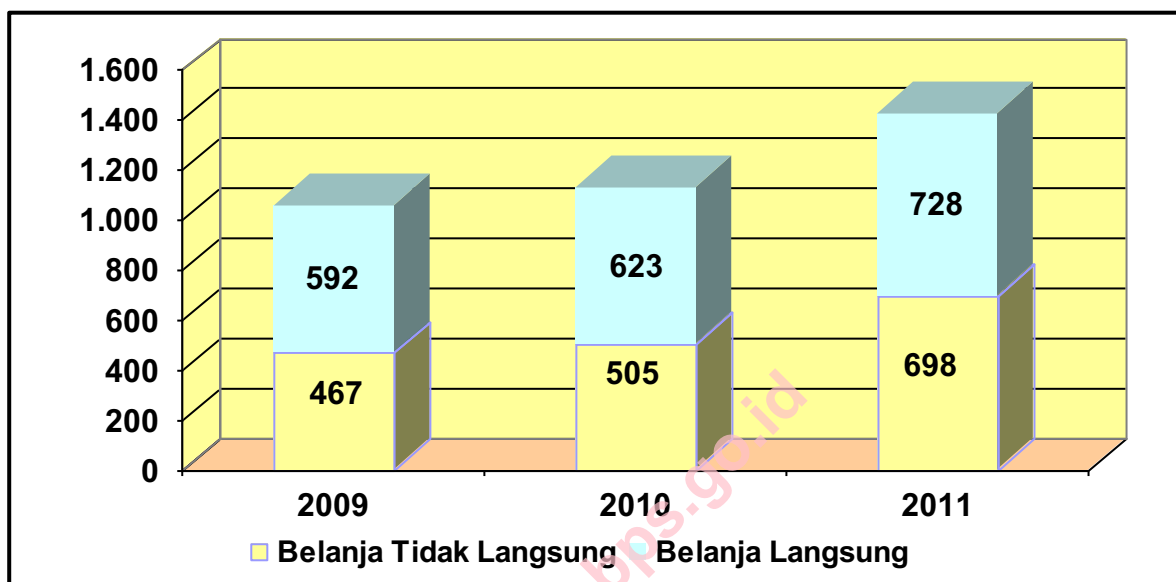


Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2011, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sejumlah 1.410,6 milyar rupiah, meningkat 26,51 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya yang mencapai 1.127,3 milyar rupiah. Sebesar 48,95 persen realisasi belanja tersebut terserap pada Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 698,1 milyar rupiah, sedangkan sebesar 51,05 persen sisanya terserap pada Belanja Langsung yaitu sejumlah 728,0 milyar rupiah. Porsi Belanja Pegawai keseluruhan baik yang berasal dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah mencapai angka yang cukup besar yakni 28,36 persen atau sejumlah 404,5 milyar rupiah, sedangkan alokasi untuk Belanja Modal dari total nilai Belanja Daerah hanya sebesar 14.62 persen atau sejumlah 208,5 milyar rupiah.

Gambar 2.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2009-2011 (milyar rupiah)



Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

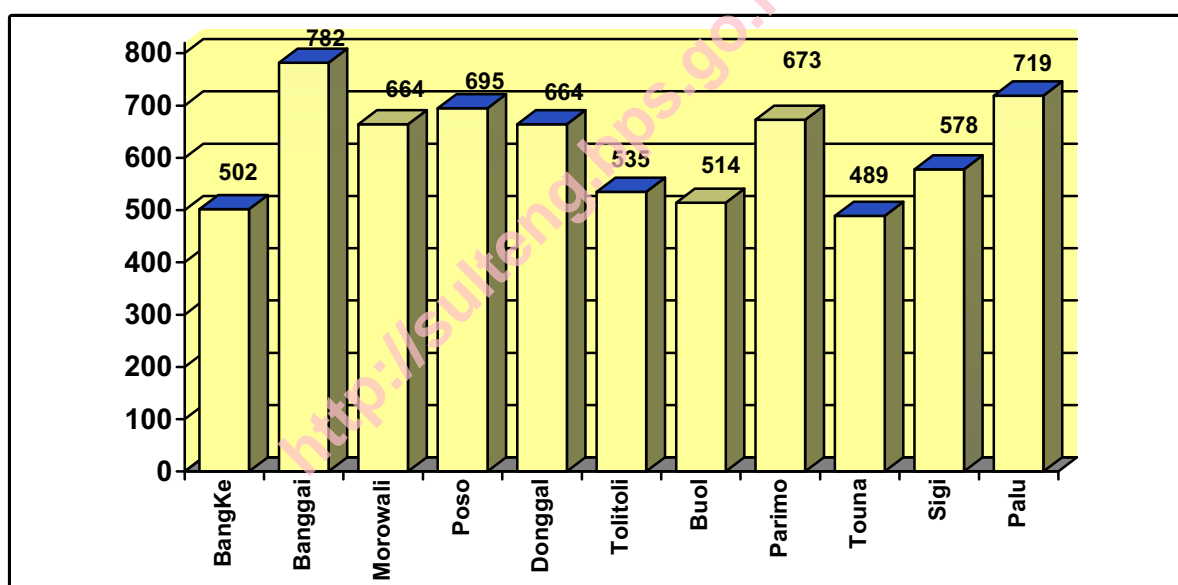
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum realisasi Pendapatan Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah yang cukup tinggi dimana ada 7 (tujuh) kabupaten yang mengalami peningkatan di atas 20 persen pada tahun anggaran 2011, peningkatan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Poso yakni sebesar 25,31 persen diikuti Kabupaten Toli-toli sebesar 24,41 %, sementara peningkatan terendah adalah Kota Palu dan Kabupaten Morowali masing-masing dengan 13,68 persen dan 12,65 persen.

Hampir semua kabupaten/kota pada tahun 2011 mengalami peningkatan realisasi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD tertinggi berhasil dicapai oleh Kabupaten Morowali sebesar 67,52 persen diikuti Kabupaten Parigi Moutong yang meningkat sebesar 55,61 persen, sedangkan peningkatan terendah dialami oleh Kabupaten Sigi yakni sebesar 2,34 persen. Selanjutnya penurunan

PAD dialami oleh Kabupaten Buol yang turun sebesar -32,16 persen atau dari 12,7 milyar rupiah pada tahun 2010 menjadi 8,6 milyar rupiah pada tahun 2011. Apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah, maka proporsi tertinggi dicapai oleh Kota Palu dengan besaran 10,89 persen, diikuti oleh Kabupaten Tojo Una-Una di urutan kedua sebesar 4,72 persen, Kabupaten Banggai di urutan ketiga sebesar 4,52 persen, dan dua terendah adalah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol masing-masing hanya sebesar 1,77 persen dan 1,68 persen.

Gambar 3.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2011 (milyar rupiah)

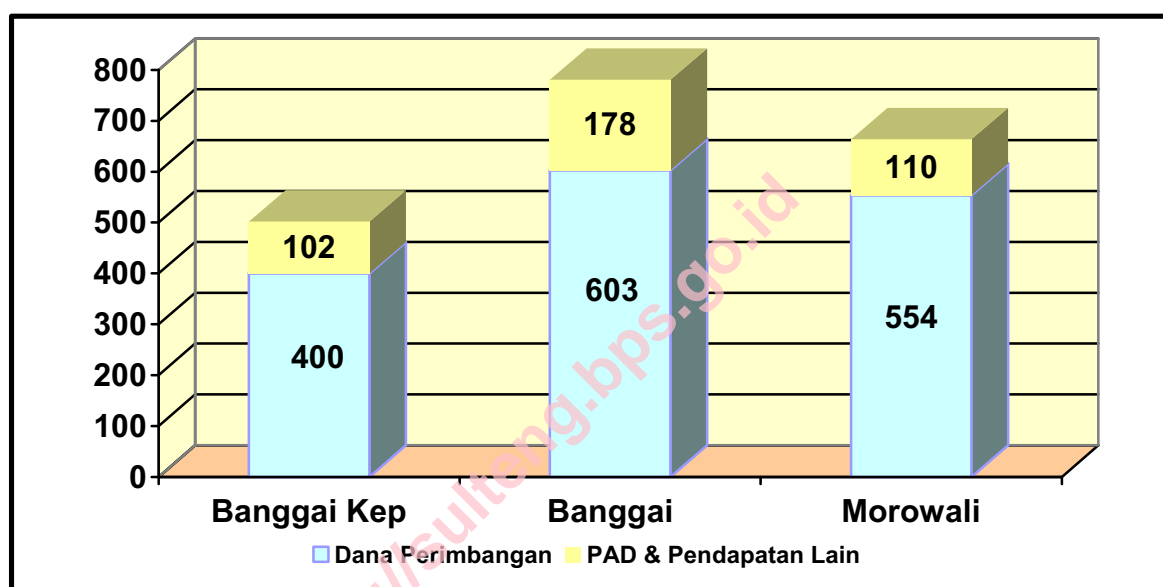


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2011 tercatat sebesar 502,1 milyar rupiah, meningkat 22,57 persen dari tahun sebelumnya sebesar 409,6 milyar rupiah. Peningkatan anggaran didorong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 44,06 persen dari 6,5 milyar pada tahun 2010 menjadi 9,4 milyar tahun 2011, realisasi bagian Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah dan bagian Dana Perimbangan masing-masing sebesar 33,82 persen dan 19,81 persen. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dari 81,49 persen andil Dana Perimbangan terhadap total pendapatan menjadi sekitar 79,66

persen, bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berubah dari 16,92 persen menjadi sekitar 18,48 persen, sedangkan bagian Pendapatan Asli Daerah berubah dari 1,59 persen menjadi 1,87 persen.

Gambar 4.1.
Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun Anggaran 2011 (milyar rupiah)



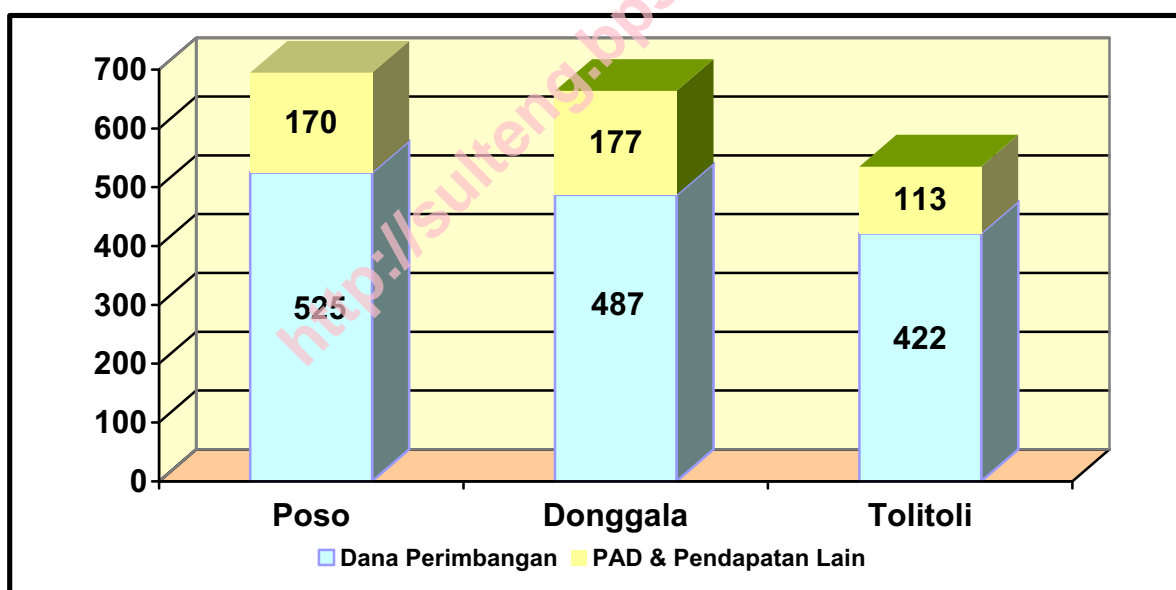
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Banggai tahun anggaran 2011 mencatat peningkatan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 15,73 persen dari 675,4 milyar rupiah menjadi 781,6 milyar rupiah. Peningkatan tertinggi disumbangkan oleh bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 61,19 persen, diikuti bagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 41,10 persen dan bagian Dana Perimbangan sebesar 7,41 persen dibandingkan tahun anggaran 2010. Struktur Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2011 masih didominasi oleh andil dari bagian Dana Perimbangan sebesar 77,17 persen, kemudian diikuti oleh bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 18,48 persen dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,52 persen.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2011 mengalami peningkatan sebesar 12,54 persen dari tahun anggaran 2010.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 67,52 persen, bagian Dana Perimbangan sebesar 14,32 persen. Sebaliknya bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar -4,42 persen menjadi 89,4 milyar rupiah setelah sebelumnya tercatat sebesar 93,6 milyar rupiah. Sumbangan terbesar terhadap jumlah total Pendapatan Daerah diberikan oleh bagian Dana Perimbangan yang mencapai sebesar 83,45 persen, selanjutnya bagian Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing menyumbangkan andil sebesar 13,47 persen dan 3,08 persen.

Gambar 4.2.
Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Tolitoli Tahun Anggaran 2011 (milyar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso pada tahun 2011 mencatat peningkatan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 25,31 persen dari 555,0 milyar rupiah menjadi 695,4 milyar rupiah. Bagian Dana Perimbangan, sebagai penyumbang 75,56 persen Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 13,71 persen dari 462,1 milyar rupiah menjadi 525,5 milyar rupiah. Tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso mengalami peningkatan realisasi

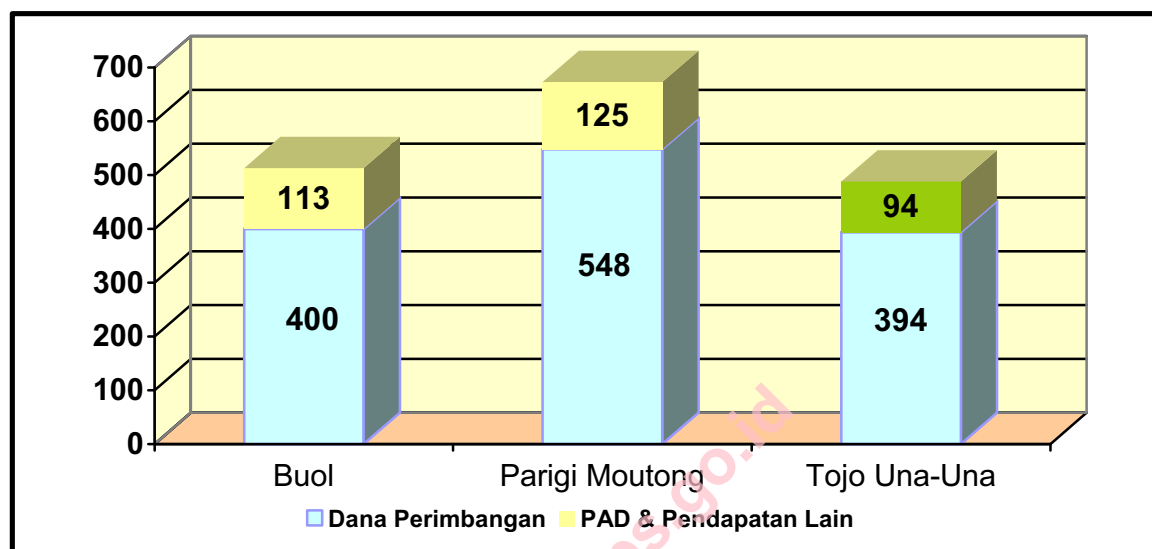
PAD sebesar 21,13 persen dari 21,2 milyar rupiah menjadi 25,7 milyar rupiah, sementara Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah turut mengalami peningkatan yang sangat fenomenal sebesar 101,32 persen. Fenomena tersebut sekaligus merubah struktur andil PAD terhadap Pendapatan Daerah menjadi sebesar 3,69 persen, sedangkan bagian Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah mempunyai andil sebesar 20,75 persen terhadap total Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala mengalami peningkatan sebesar 20,97 persen dari realisasi 549,1 milyar rupiah pada tahun 2010 menjadi sebesar 664,2 milyar rupiah pada tahun 2011. Peningkatan jumlah anggaran tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar 27,31 persen dibandingkan tahun 2010. Peningkatan realisasi DAU mendorong peningkatan realisasi Dana Perimbangan sebesar 11,54 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 27,31 persen. Peningkatan realisasi PAD menyebabkan terjadinya pergeseran struktur andil PAD terhadap Pendapatan Daerah menjadi sebesar 4,47 persen, sedangkan Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat masing-masing sebesar 73,32 persen dan 22,21 persen.

Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2011 juga terjadi pada Kabupaten Toli-Toli sebesar 24,41 persen yang merupakan peningkatan tertinggi kedua setelah Kabupaten Poso. Tahun anggaran 2011 total realisasi pendapatan Kabupaten Toli-Toli mencapai 535,0 milyar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 430,0 milyar rupiah. Bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan tertinggi sebesar 171,71 persen, sementara Dana Perimbangan meningkat sebesar 10,63 persen. Pada periode yang sama bagian Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 26,83 persen. Kontribusi terbesar penyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2011 adalah bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 78,87 persen, diikuti oleh bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 18,01 persen dan bagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,11 persen.

Gambar 4.3.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (milyar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

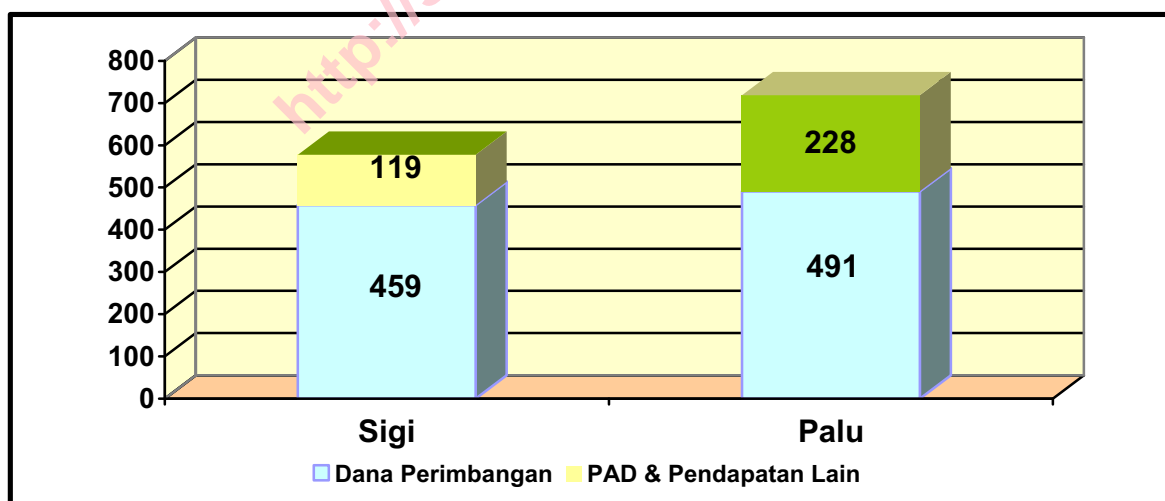
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2011 mencapai 513,7 milyar rupiah, meningkat 20,44 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 426,5 milyar rupiah. Peningkatan Pendapatan Daerah disumbangkan oleh peningkatan bagian Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 91,30 persen, diikuti oleh bagian Dana Perimbangan sebesar 11,52 persen sementara bagian Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar -32,16 persen. Apabila dilihat dari strukturnya maka bagian terbesar Pendapatan Daerah disumbangkan oleh Dana Perimbangan sebesar 77,96 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing hanya menyumbangkan sebesar 1,68 persen dan 20,36 persen.

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2011 mencatat realisasi pendapatan sebesar 672,6 milyar rupiah atau meningkat 21,92 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya tercatat sebesar 551,7 milyar rupiah. Peningkatan tersebut didorong oleh bagian Pendapatan Asli Daerah yang turut meningkat sebesar 55,16 persen diikuti bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meningkat sebesar 28,18 persen, selanjutnya bagian Dana Perimbangan

meningkat 19,82 persen. Struktur Pendapatan Daerah didominasi oleh Bagian Dana Perimbangan dengan andil sebesar 81,43 persen, selanjutnya andil Bagian PAD dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah berturut-turut sebesar 3,06 persen dan 15,51 persen.

Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2011 memperoleh Pendapatan Daerah sebesar 488,6 milyar rupiah meningkat sebesar 17,66 persen dibanding tahun 2010. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah disebabkan oleh meningkatnya bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 44,10 persen diikuti kenaikan realisasi bagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,26 persen dan bagian Dana Perimbangan sebesar meningkat sebesar 14,01 persen. Peningkatan tersebut mengakibatkan bergesernya struktur Pendapatan Daerah dengan bagian Pendapatan Asli Daerah menjadi sebesar 4,72 persen, Dana Perimbangan sebesar 80,66 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 14,62 persen.

Gambar 4.4.
Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Kota Palu
Tahun Anggaran 2011 (milyar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Kabupaten Sigi pada tahun anggaran 2011 merealisasikan Pendapatan Daerah sebesar 578,3 milyar rupiah, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 22,07 persen dari realisasi tahun sebelumnya seiring dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah sebagai sebuah daerah yang mandiri. Peningkatan realisasi terjadi

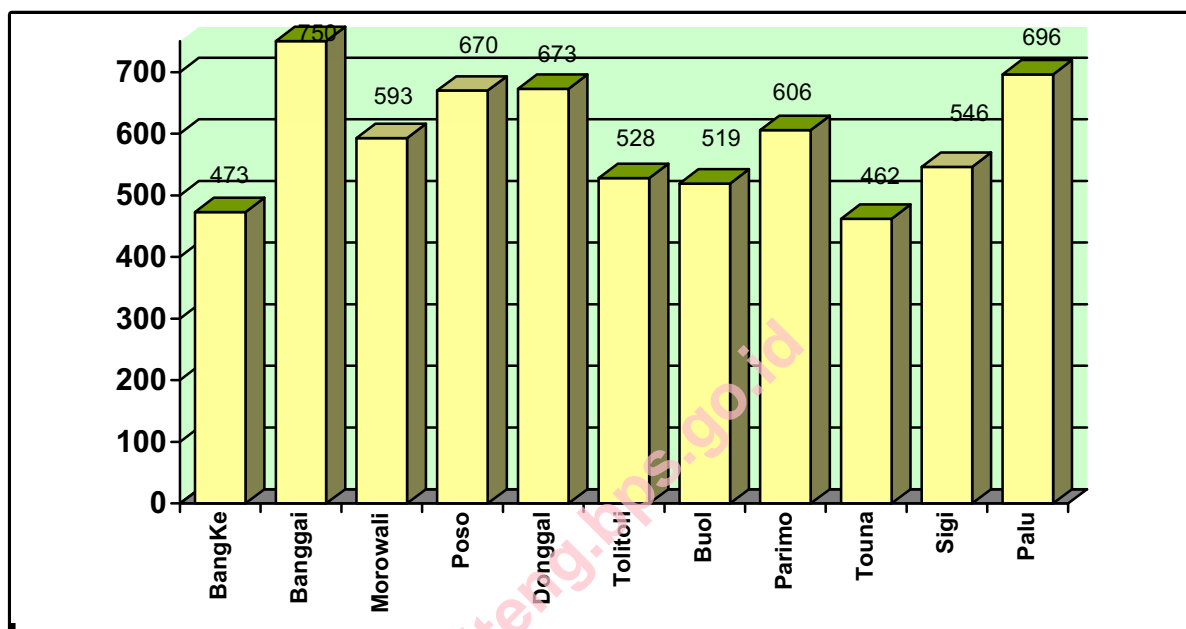
di seluruh komponen Pendapatan Daerah, yaitu bagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,34 persen, bagian Dana Perimbangan sebesar 21,05 persen dan bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 29,01 persen. Dilihat dari struktur pembentuknya, bagian Dana Perimbangan mendominasi dengan andil sebesar 79,40 persen, diikuti oleh bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 18,83 persen dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,77 persen.

Total Pendapatan Daerah Kota Palu tahun anggaran 2011 mencapai 719,4 milyar rupiah atau mengalami peningkatan 13,68 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 632,8 milyar rupiah. Seluruh komponen Pendapatan Daerah menunjukkan pertumbuhan positif, Pendapatan Asli Daerah mencapai peningkatan sebesar 37,71 persen, Dana Perimbangan meningkat sebesar 12,57 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat signifikan sebesar 7,36 persen. Pendapatan Asli Daerah Kota Palu sebagai tolok ukur kinerja daerah memiliki andil sebesar 10,89 persen terhadap total Pendapatan Daerah merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki andil PAD diatas 10 persen. Selanjutnya bagian Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan andil masing-masing sebesar 68,29 persen dan 20,82 persen.

2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2011 sebesar 472,5 milyar rupiah, meningkat sebesar 9,10 persen dari tahun sebelumnya. Komposisi belanja daerah terdiri dari 50,87 persen Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 240,4 milyar rupiah dan 49,13 persen Belanja Langsung atau setara dengan 232,2 milyar rupiah. Komponen Belanja Langsung didominasi oleh Belanja Modal yang mencapai 66,48 persen, kemudian diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 27,85 persen dan 5,67 persen sisanya dipergunakan untuk porsi Belanja Pegawai.

Gambar. 5
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2011 (milyar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

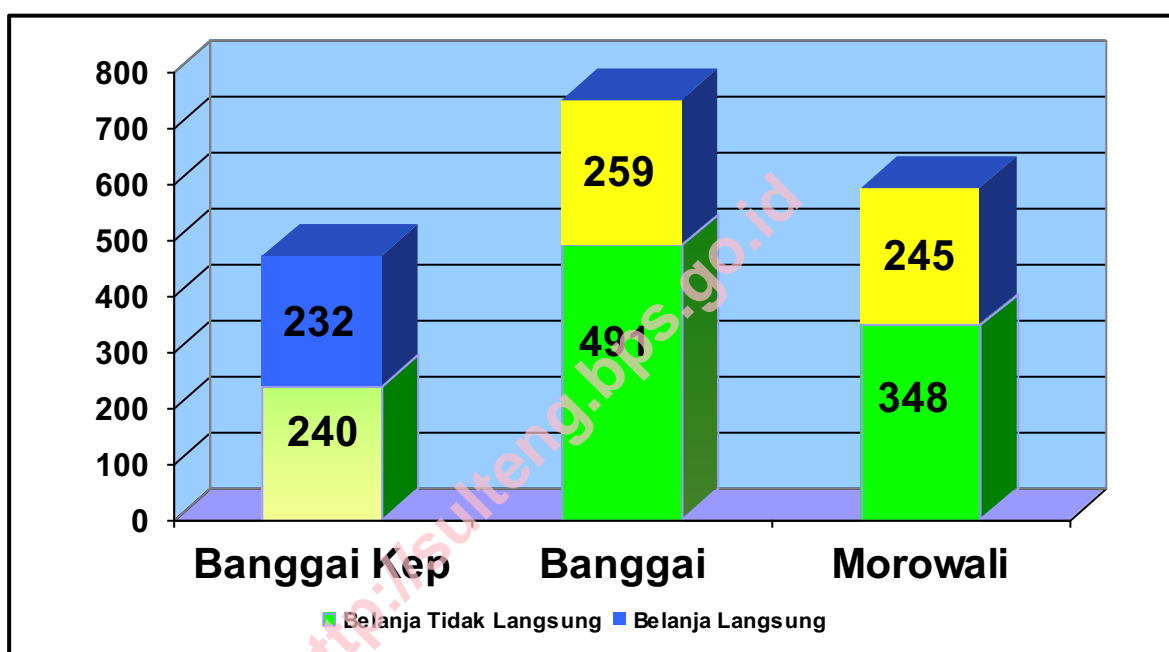
Kabupaten Banggai tahun anggaran 2011 berhasil merealisasikan Belanja Daerah sebesar 750,4 milyar rupiah, naik sekitar sebesar 12,37 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebesar 65,46 persen direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung, sedangkan 34,54 persen untuk Belanja Langsung. Dari sekitar 259,2 milyar rupiah keseluruhan Belanja Langsung, 47,92 persen diantaranya digunakan untuk Belanja Modal sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang mendapat porsi masing-masing sebesar 2,41 persen dan 50,16 persen.

Pada tahun 2011 Kabupaten Morowali menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang mengalami penurunan belanja daerah, Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang terealisasi sebesar 592,7 milyar rupiah atau mengalami penurunan sebesar -0,97 persen atau setara dengan 5,78 milyar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Sebesar 58,67 persen dipergunakan untuk Belanja Tidak

Langsung dan 41,33 persen untuk Belanja Langsung. Komposisi Belanja Langsung sebesar 245,0 milyar rupiah dialokasikan sebesar 50,63 persen untuk Belanja Modal, 40,39 persen untuk Belanja Barang dan 8,99 persen untuk Belanja Pegawai.

Gambar. 6.1.

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun Anggaran 2010 (milyar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

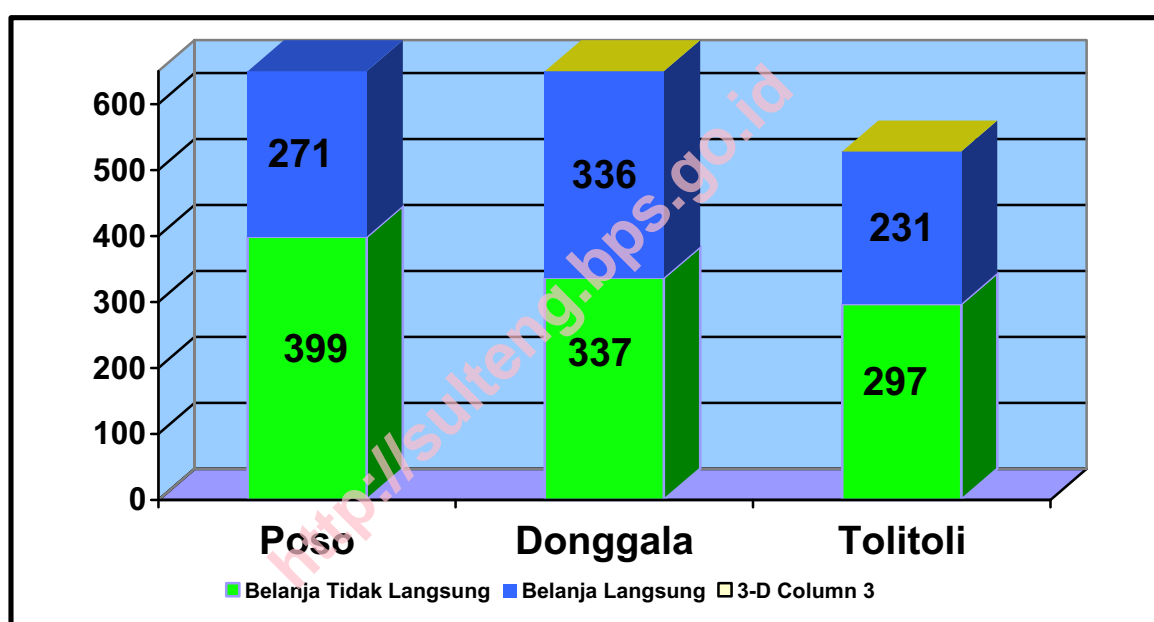
Kabupaten Poso tahun 2011 menghabiskan anggaran sebesar 669,5 milyar rupiah untuk Belanja Daerah atau mengalami peningkatan sebesar 13,48 persen dibandingkan belanja tahun sebelumnya. Porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 59,52 persen, sedangkan Belanja Langsung mendapat porsi sebesar 40,48 persen. Belanja Langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah sebesar 271,0 milyar rupiah digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar 9,08 persen, Belanja Barang sebesar 40,64 persen dan Belanja Modal sebesar 50,27 persen.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala tahun 2011 sebesar 673,0 milyar rupiah, meningkat 27,39 persen dari tahun sebelumnya yang

mencapai 528,3 milyar rupiah. Pada tahun 2011 ini porsi belanja sebesar 50,09 persen dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung, sedangkan Belanja Langsung hanya mendapat alokasi belanja sebesar 49,91 persen. Total anggaran Belanja Langsung sebesar 336 milyar rupiah digunakan 8,82 persen untuk Belanja Pegawai, 40,06 persen untuk Belanja Barang dan 54,12 persen Belanja Modal.

Gambar. 6.2.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Tolitoli Tahun Anggaran 2010 (milyar rupiah)

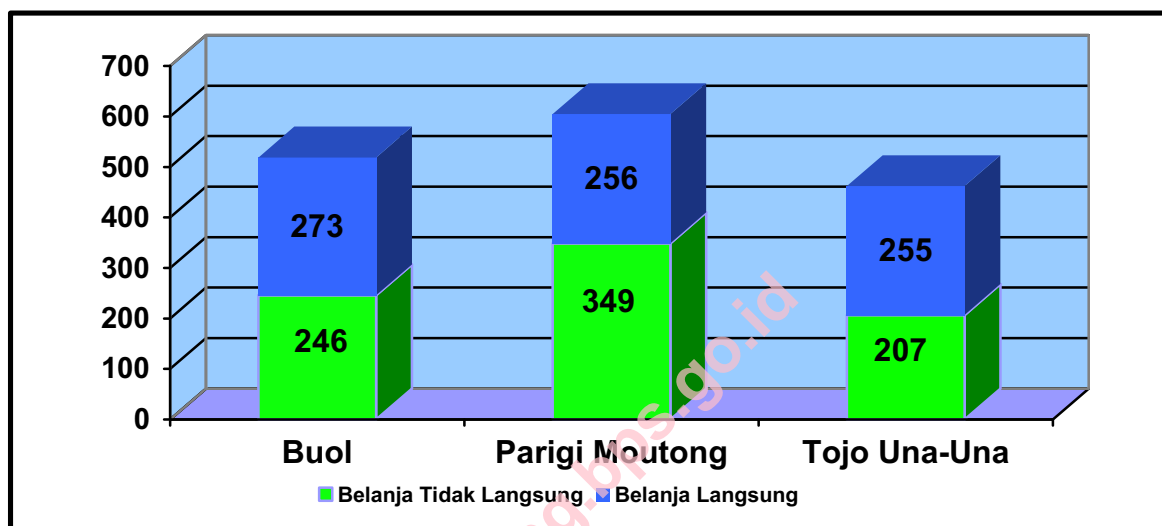


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Total Belanja Daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2011 tercatat sebesar 527,8 milyar rupiah mengalami peningkatan sebesar 36,01 persen dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Dari sejumlah alokasi belanja tersebut Kabupaten Toli-toli mengalokasikan dana untuk Belanja Langsung sebesar 43,78 persen atau senilai 231 milyar rupiah, sedangkan 56,22 persen sisanya digunakan untuk Belanja Tidak Langsung. Sebesar 51,46 persen dari total 231 milyar rupiah Belanja Langsung direalisasikan untuk Belanja Modal, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing mendapatkan bagian sebesar 8,00 persen dan 40,54 persen.

Gambar. 6.3.

**Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una
Una-Una Tahun Anggaran 2010 (milyar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

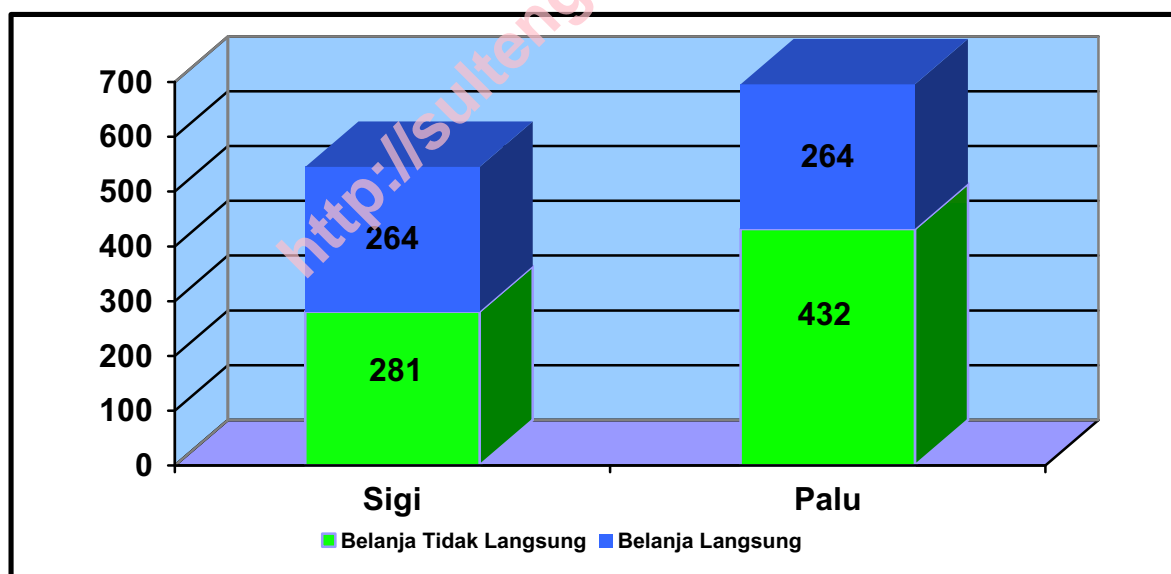
Kabupaten Buol tercatat mengalami peningkatan realisasi belanja sebesar 32,3 persen dari tahun sebelumnya hingga mencapai 519,2 milyar rupiah pada tahun 2011. Realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk porsi Belanja Langsung sebesar 52,57 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 47,43. Sebesar 272,9 milyar rupiah total Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Modal sebesar 158,4 milyar rupiah atau setara dengan 58,03 persen, sedangkan sebesar 30,19 persen untuk Belanja Barang dan 11,06 persen untuk Belanja Pegawai.

Pada tahun 2011 pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong merealisasikan total belanja daerah sebesar 605,6 milyar rupiah, meningkat 12,10 persen dari tahun 2010 sebesar 540,2 milyar rupiah. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 349,1 milyar rupiah atau sebesar 57,65 persen, sedangkan Belanja Langsung sebesar 42,35 persen atau sebesar 256,5 milyar rupiah. Alokasi terbanyak dari total Belanja Langsung sebesar 49,16 persen atau 126,1 milyar rupiah digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Pegawai dan

Belanja Modal masing-masing mendapat porsi sebesar 10,37 persen dan 40,47 persen.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2011 mencapai 461,6 milyar rupiah, meningkat 9,72 persen dari tahun sebelumnya sebesar 420,7 milyar rupiah. Bagian Belanja Tidak Langsung menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2010 sebesar 12,55 persen, sedangkan bagian Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 7,53 persen. Sebesar 55,22 persen total Belanja Daerah atau sejumlah 255 milyar rupiah realisasi Belanja Langsung dimanfaatkan untuk Belanja Pegawai sebesar 10,85 persen, Belanja Barang sebesar 38,17 persen dan Belanja Modal sebesar 50,98 persen.

Gambar. 6.4.
Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Kota Palu
Tahun Anggaran 2010 (milyar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Tahun anggaran 2011 Kabupaten Sigi berhasil merealisasikan anggaran Belanja Daerah sejumlah 545,5 milyar rupiah, atau meningkat sebesar 17,72 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Belanja Tidak Langsung tercatat sejumlah 281,5 milyar rupiah atau sebesar 51,59 persen dan Belanja Langsung sejumlah 264,1 milyar rupiah atau sebesar 48,41 persen. Total Belanja Langsung

dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing sebesar 7,87 persen, 40,70 persen dan 51,43 persen.

Kota Palu pada tahun 2011 merealisasikan Belanja Daerah sejumlah 696,0 milyar rupiah, jumlah ini mengalami peningkatan 10,01 persen dari tahun 2010 yang hanya sebesar 632,6 milyar rupiah. Peningkatan realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Belanja Tidak Langsung sebesar 6,05 persen, sementara Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 17,18 persen dari tahun sebelumnya. Porsi Belanja Langsung tahun 2011 mencapai 264,2 milyar rupiah atau 37,97 persen dari total Belanja Daerah, sedangkan 62,03 persen sisanya direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung. Belanja Barang mendapat porsi terbesar dari Belanja Langsung mencapai 119,7 milyar rupiah atau 45,28 persen. Sementara itu Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing terealisasi sebesar 48,4 milyar rupiah (18,33 persen) dan 96,1 milyar rupiah (36,39 persen) dari total Belanja Langsung.

Tabel - Tabel

<http://sulteng.bps.go.id>

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	1 052 332 636	1 177 609 898	1.410.593.609
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107 915 558	176 688 420	205.216.673
1. Pendapatan Asli Daerah	275 191 234	411 797 140	519.974.416
1.1. Pajak Daerah	223 061 767	344 354 727	421.221.594
1.2. Retribusi Daerah	20 731 195	29 650 214	14.058.850
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7 525 806	11 384 015	17.796.093
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	23 872 466	26 408 183	66.897.879
2. Dana Perimbangan	756 439 213	759 172 266	864.098.666
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	66 985 027	71 244 195	82.757.807
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	629 397 186	659 331 271	743.161.759
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	60 057 000	28 596 800	38.179.100
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20 702 188	6 640 493	26.520.527
3.1. Pendapatan Hibah	18 660 106	2 089 380	3.589.590
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	-	4 551 113	11.280.937
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.6. Pendapatan Lainnya	2 042 082	-	11.650.000

Tabel 2.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	1 059 732 420	1 127 256 721	1.426.082.334
1. Belanja Tidak Langsung	467 376 969	504 698 487	698.081.241
1.1. Belanja Pegawai	258 665 067	291 205 303	329.217.099
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	34 174 084	58 608 736	112.792.357
1.5. Belanja Bantuan Sosial	16 407 713	13 923 701	13.158.771
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	112 284 226	93 456 634	179.200.037
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	45 845 879	47 504 113	66.280.191
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	-	2.474.577
2. Belanja Langsung	592 355 452	622 558 234	728.001.093
2.1. Belanja Pegawai	58 952 351	59 207 689	75.293.666
2.2. Belanja Barang dan Jasa	321 587 886	359 558 245	444.210.633
2.3. Belanja Modal	211 815 214	203 792 301	208.496.794

Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah

Tabel 3.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	392 849 981	409 615 412	502.054.720
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89 135 792	30 077 945	31.626.697
1. Pendapatan Asli Daerah	9 951 622	6 505 839	9.372.321
1.1. Pajak Daerah	1 981 439	2 128 115	4.261.449
1.2. Retribusi Daerah	1 407 255	884 481	1.856.436
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	122 537	224 207	344.616
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6 440 391	3 269 036	2.909.820
2. Dana Perimbangan	326 811 668	333 786 689	399.916.296
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	23 973 964	27 053 066	27.992.316
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	255 283 704	273 612 923	323.380.879
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	47 554 000	33 120 700	48.543.100
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	56 086 691	69 322 884	92.765.900
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	4 165 614	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	2 255 433	5 501 012	7.248.105
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	44 474 744	60 221 959	82.917.882
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	5 190 900	3 599 913	2.599.913
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	31.626.697

Tabel 4.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	451 637 567	433 098 056	472.518.292
1. Belanja Tidak Langsung	156 622 163	205 113 607	240.352.921
1.1. Belanja Pegawai	136 862 367	181 936 110	208.190.194
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	2 475 300	4 526 888	13.734.562
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5 991 167	4 135 000	3.415.000
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	11 140 000	14 515 609	15.013.164
1.8. Belanja Tidak Terduga	153 330	-	-
2. Belanja Langsung	295 015 404	227 984 449	232.165.370
2.1. Belanja Pegawai	19 069 501	12 544 167	13.161.696
2.2. Belanja Barang dan Jasa	55 886 313	49 120 377	64.655.437
2.3. Belanja Modal	220 059 590	166 319 904	154.348.237

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 5.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	630 106 818	675 358 217	781.606.353
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70 897 813	47 726 705	85.923.239
1. Pendapatan Asli Daerah	24 295 252	25 045 048	35.337.773
1.1. Pajak Daerah	5 426 046	6 383 971	12.858.651
1.2. Retribusi Daerah	9 744 345	12 227 869	16.428.085
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	752 216	1 092 442	1.664.665
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8 372 644	5 340 764	4.386.372
2. Dana Perimbangan	534 518 224	561 520 982	603.142.422
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	31 315 806	38 541 999	34.843.945
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	449 171 418	474 875 783	504.060.276
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	54 031 000	48 103 200	64.238.200
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71 293 342	88 792 188	143.126.159
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 106 078	14 896 241	23.741.089
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	51 265 264	71 401 959	116.391.081
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 922 000	2 493 988	2.993.989
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Tabel 6.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	652 865 927	667 762 033	750.357.356
1. Belanja Tidak Langsung	366 188 944	415 617 001	491.201.970
1.1. Belanja Pegawai	331 966 050	391 762 350	441.776.931
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	1 049 500	694 090	564.000
1.4. Belanja Hibah	11 029 382	11 444 982	19.144.324
1.5. Belanja Bantuan Sosial	7 638 090	4 769 555	5.682.440
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	6 935 637	11.286.699
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	14 505 922	-	12.551.076
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	10 387	196.500
2. Belanja Langsung	286 676 983	252 145 032	259.155.386
2.1. Belanja Pegawai	6 955 305	5 216 114	6.255.843
2.2. Belanja Barang dan Jasa	96 497 361	89 211 514	130.002.474
2.3. Belanja Modal	183 224 317	157 717 404	122.897.069

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 7.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	530 613 326	590 295 575	663.787.533
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32 331 395	10 436 601	21.096.907
1. Pendapatan Asli Daerah	13 254 169	12 193 889	20.427.012
1.1. Pajak Daerah	1 314 528	1 664 101	3.077.846
1.2. Retribusi Daerah	6 438 012	6 932 001	11.266.076
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	776 595	-	1.847.792
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4 725 033	3 597 787	4.235.299
2. Dana Perimbangan	458 018 229	484 546 259	553.944.668
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	45 845 357	49 827 269	69.731.918
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	368 918 872	393 928 690	435.729.051
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	43 254 000	40 790 300	48.483.700
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	59 340 928	93 555 426	89.415.852
3.1. Pendapatan Hibah	-	59 710 959	16.939.792
3.2. Dana Darurat	-	867 000	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	8 536 890	6 605 287	14.768.163
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	44 756 878	17 603 612	54.854.165
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	6 047 160	3 603 732	2.853.732
3.6. Pendapatan Lainnya	-	5 164 836	-

Tabel 8.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun
Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	550 751 525	598 506 393	592.724.337
1. Belanja Tidak Langsung	227 405 086	285 830 302	347.752.391
1.1. Belanja Pegawai	208 065 643	247 473 314	301.415.316
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	7 228 650	12 180 000	10.955.696
1.5. Belanja Bantuan Sosial	9 475 543	8 076 085	9.893.077
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	75 000	16 360 000	24.480.530
1.8. Belanja Tidak Terduga	2 560 250	1 740 903	1.007.773
2. Belanja Langsung	323 346 439	312 676 091	244.971.946
2.1. Belanja Pegawai	23 317 268	20 964 714	22.016.343
2.2. Belanja Barang dan Jasa	134 986 845	112 033 308	98.934.124
2.3. Belanja Modal	165 042 326	179 678 069	124.021.479

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 9.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	572 868 472	554 979 291	695.429.034
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	88 059 793	48 101 427	37.678.141
1. Pendapatan Asli Daerah	23 042 168	21 179 872	25.654.921
1.1. Pajak Daerah	3 576 592	4 031 995	5.035.084
1.2. Retribusi Daerah	10 856 859	9 098 042	13.673.257
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	819 009	1 251 353	1.900.713
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7 789 726	6 798 480	5.045.866
2. Dana Perimbangan	475 532 246	462 116 890	525.463.131
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	27 445 119	34 660 353	34.142.751
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	379 547 127	387 195 137	433.883.180
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	68 540 000	40 261 400	57.437.200
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	74 294 040	71 682 528	144.310.981
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	9 479 440	9 530 614	15.334.908
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	54 222 875	58 567 652	126.976.073
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 591 725	3 584 261	2.000.000
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Tabel 10.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	611 821 139	590 022 316	669.530.141
1. Belanja Tidak Langsung	323 841 276	365 699 027	398.500.643
1.1. Belanja Pegawai	260 985 714	317 186 780	358.973.861
1.2. Belanja Bunga	45 959	82 193	94.202
1.3. Belanja Subsidi	-	1 975 000	6.370.000
1.4. Belanja Hibah	38 895 116	23 843 400	10.861.786
1.5. Belanja Bantuan Sosial	7 816 717	6 914 434	6.397.997
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	977 166	977 166	977.166
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	13 023 872	13 292 564	13.973.563
1.8. Belanja Tidak Terduga	2 096 732	1 427 488	852.068
2. Belanja Langsung	287 979 863	224 323 289	271.029.498
2.1. Belanja Pegawai	20 281 046	22 402 115	24.622.701
2.2. Belanja Barang dan Jasa	115 530 836	100 947 648	110.156.642
2.3. Belanja Modal	152 167 981	100 973 525	136.250.155

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 11.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	445 774 515	549 069 265	664.225.188
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48 009 893	37 703 196	59.826.838
1. Pendapatan Asli Daerah	33 870 327	23 311 791	29.678.660
1.1. Pajak Daerah	13 043 376	14 123 731	15.693.082
1.2. Retribusi Daerah	2 174 500	2 847 079	5.193.874
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	934 219	1 547 343	2.312.253
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17 718 231	4 793 638	6.479.451
2. Dana Perimbangan	373 232 836	436 622 447	487.025.377
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	20 596 918	32 771 327	29.589.675
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	288 617 918	351 934 720	392.154.602
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	64 018 000	51 916 400	65.281.100
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38 671 352	89 135 477	147.521.151
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	2.000.000
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	15 849 000	12 125 404	22.271.419
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	19 929 352	72 075 261	119.384.849
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 893 000	4 934 813	3.864.883
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Tabel 12.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	455 726 312	528 326 147	673.019.680
1. Belanja Tidak Langsung	281 100 151	303 444 112	337.125.931
1.1. Belanja Pegawai	220 855 610	263 704 221	293.530.460
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	50 027 887	19 696 075	24.948.713
1.5. Belanja Bantuan Sosial	2 117 025	2 514 440	3.852.350
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	828 338	2 084 720	1.475.442
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	6 632 990	14 688 314	12.318.966
1.8. Belanja Tidak Terduga	638 300	756 342	1.000.000
2. Belanja Langsung	174 626 160	224 882 036	335.893.749
2.1. Belanja Pegawai	16 439 288	17 989 854	29.623.785
2.2. Belanja Barang dan Jasa	78 579 335	85 134 218	134.567.427
2.3. Belanja Modal	79 607 538	121 757 964	171.702.537

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 13.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	417 523 437	430 013 283	534.975.629
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7 332 233	11 823 910	25.226.347
1. Pendapatan Asli Daerah	19 676 782	13 131 984	16.655.710
1.1. Pajak Daerah	2 804 023	2 575 311	3.210.996
1.2. Retribusi Daerah	8 429 432	7 634 369	7.593.548
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	887 966	1 073 439	1.526.964
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7 555 360	1 848 864	4.324.202
2. Dana Perimbangan	375 720 377	381 413 653	421.950.704
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	20 848 463	22 833 895	22.713.527
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	307 431 914	319 134 358	351.739.677
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	47 440 000	39 445 400	47.497.500
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22 126 278	35 467 644	96.369.213
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	5 459 714	8 847 578	13.904.255
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	13 704 864	18 928 577	80.464.958
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 961 700	7 691 489	2.000.000
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Tabel 14.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	411 317 100	388 033 918	527.764.251
1. Belanja Tidak Langsung	200 122 148	252 915 039	296.719.701
1.1. Belanja Pegawai	181 707 596	211 240 945	262.530.501
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	123 928	-	4.734.378
1.4. Belanja Hibah	592 694	17 714 170	3.196.701
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5 085 177	3 276 876	4.458.175
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	418 765	397 641	83.578
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	11 871 573	16 128 572	21.649.768
1.8. Belanja Tidak Terduga	322 415	4 156 835	66.600
2. Belanja Langsung	211 194 952	135 118 879	231.044.550
2.1. Belanja Pegawai	18 902 603	15 708 005	18.489.392
2.2. Belanja Barang dan Jasa	76 533 021	62 683 317	93.660.491
2.3. Belanja Modal	115 759 328	56 727 557	118.894.667

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 15.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	415 085 627	426 500 811	513.684.326
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14 530 043	13 534 656	2.747.698
1. Pendapatan Asli Daerah	9 272 948	12 725 886	8.633.017
1.1. Pajak Daerah	3 167 022	2 022 081	2.194.248
1.2. Retribusi Daerah	1 746 412	1 890 844	1.453.793
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	680 910	2 396 359	3.197.111
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3 678 604	6 416 602	1.787.866
2. Dana Perimbangan	335 248 426	359 103 081	400.461.434
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	23 704 738	24 685 904	26.014.616
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	258 595 688	299 404 077	328.940.318
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	52 948 000	35 013 100	45.506.500
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	70 564 252	54 671 844	104.589.875
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	3 289 649	6 343 393	11.009.830
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	66 224 603	40 307 959	89.868.826
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1 050 000	8 020 492	2.529.215
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	1.182.004

Tabel 16.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	415 343 564	392 946 927	519.189.006
1. Belanja Tidak Langsung	154 041 599	201 177 609	246.249.534
1.1. Belanja Pegawai	141 665 688	176 303 573	216.487.672
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	3 251 875	2 600 000	2.500.000
1.4. Belanja Hibah	4 612 231	10 771 550	19.700.887
1.5. Belanja Bantuan Sosial	431 000	573 700	500.000
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	495 287	260 429	457.515
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	3 000 000	6 535 000	5.000.000
1.8. Belanja Tidak Terduga	585 518	4 133 358	1.603.460
2. Belanja Langsung	261 301 964	191 769 318	272.939.472
2.1. Belanja Pegawai	19 220 675	24 813 183	30.197.013
2.2. Belanja Barang dan Jasa	74 748 296	59 826 832	84.344.300
2.3. Belanja Modal	167 332 994	107 129 303	158.398.159

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 17.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	496 511 943	551 661 598	672.566.548
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72 091 553	14 309 157	68.597.053
1. Pendapatan Asli Daerah	11 260 064	13 224 691	20.578.988
1.1. Pajak Daerah	2 790 628	2 963 407	3.671.050
1.2. Retribusi Daerah	3 613 110	4 229 936	8.472.696
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	1 811 463	166.984
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4 856 326	4 219 885	6.765.259
2. Dana Perimbangan	460 915 159	457 075 285	547.685.241
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	26 485 502	29 164 698	2.857.235
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	365 471 657	384 004 987	447.590.706
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	68 958 000	43 905 600	70.237.300
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24 336 720	81 361 623	104.292.319
3.1. Pendapatan Hibah	1 049 956	1 533 068	422.341
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	9 805 590	13 295 830	20.860.324
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	7 346 175	61 899 275	79.736.205
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	6 135 000	4 633 449	3.273.449
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Tabel 18.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	526 300 111	540 208 141	605.599.847
1. Belanja Tidak Langsung	271 331 774	295 277 239	349.115.670
1.1. Belanja Pegawai	202 072 382	255 878 983	30.730.294
1.2. Belanja Bunga	1 177 278	3 690 389	6.119.117
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	50 027 404	10 420 849	350.000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	3 834 416	5 169 400	4.650.300
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi	825 212	834 949	-
/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada	13 240 082	19 103 000	200.000
Provinsi/Kab/Kota dan Desa			-
1.8. Belanja Tidak Terduga	155 000	179 670	826.695
2. Belanja Langsung	254 968 337	244 930 902	256.484.177
2.1. Belanja Pegawai	33 335 901	24 459 944	26.603.284
2.2. Belanja Barang dan Jasa	93 149 776	96 004 834	126.083.186
2.3. Belanja Modal	128 482 660	124 466 124	103.797.707

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 19.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	424 037 104	415 285 138	488.629.280
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	54 795 945	35 732 834	48.326.997
1. Pendapatan Asli Daerah	19 538 482	19 995 802	23.047.285
1.1. Pajak Daerah	2 383 703	1 494 304	3.203.297
1.2. Retribusi Daerah	5 707 038	6 076 083	13.107.236
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	580 972	1 118 685	1.576.469
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10 866 769	11 306 728	5.160.283
2. Dana Perimbangan	337 140 169	345 708 680	394.136.670
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	23 397 537	29 412 896	28.798.726
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	263 960 632	273 095 484	310.268.045
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	49 782 000	43 200 300	55.069.900
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	67 358 452	49 580 655	71.445.324
3.1. Pendapatan Hibah	-	33 773 271	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	6 157 693	6 088 905	11.053.375
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	58 385 760	6 274 250	54.447.721
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 815 000	3 444 228	5.944.228
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Tabel 20.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	435 900 214	420 693 262	461.582.759
1. Belanja Tidak Langsung	132 590 106	183 634 312	206.677.471
1.1. Belanja Pegawai	119 381 918	156 036 308	183.777.995
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	2 043 450	15 066 120	14.692.444
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 954 602	1 712 673	2.684.914
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	499 500	495.450
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	8 329 856	7 463 111	4.653.364
1.8. Belanja Tidak Terduga	880 280	2 856 600	373.303
2. Belanja Langsung	303 310 107	237 058 949	254.905.288
2.1. Belanja Pegawai	25 416 770	23 576 923	27.647.824
2.2. Belanja Barang dan Jasa	92 265 622	95 837 984	97.298.711
2.3. Belanja Modal	185 627 716	117 644 042	129.958.753

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 21.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	246 320 960	473 730 530	578.298.752
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	15 300 212	58.293.195
1. Pendapatan Asli Daerah	2 973 675	10 024 946	10.259.653
1.1. Pajak Daerah	891 151	1 451 660	2.154.060
1.2. Retribusi Daerah	818 576	1 674 220	3.426.320
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1 263 948	6 899 065	4.676.273
2. Dana Perimbangan	230 691 855	379 319 088	459.170.408
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	13 671 833	19 759 832	21.815.574
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	215 939 122	329 604 056	383.436.034
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 080 900	29 955 200	53.918.800
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12 655 429	84 386 497	108.868.691
3.1. Pendapatan Hibah	-	72 899 151	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	844 829	1 550 902	5.264.588
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	8 265 600	-	87.027.659
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 545 000	9 936 444	16.576.444
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Tabel 22.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	231 020 748	463 420 373	545.523.810
1. Belanja Tidak Langsung	169 657 355	257 757 319	281.461.841
1.1. Belanja Pegawai	150 377 790	219 116 359	248.061.909
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	3 023 108	22 441 872	8.000.644
1.5. Belanja Bantuan Sosial	795 012	1 493 230	3.497.938
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	14 705 857	21.208.364
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	15 461 444	-	-
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	-	692.987
2. Belanja Langsung	61 363 392	205 663 054	264.061.969
2.1. Belanja Pegawai	5 147 257	13 920 570	20.772.738
2.2. Belanja Barang dan Jasa	29 373 186	75 305 237	107.482.177
2.3. Belanja Modal	26 842 949	116 437 247	135.807.053

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Tabel 23.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	564 570 703	632 786 840	719.383.518
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11 809 288	13 217 537	37.935.244
1. Pendapatan Asli Daerah	51 946 620	56 895 143	78.350.111
1.1. Pajak Daerah	17 030 143	18 208 754	26.708.554
1.2. Retribusi Daerah	30 716 261	35 005 418	46.250.695
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 170 026	179 393	861.501
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3 030 190	3 501 579	4.529.360
2. Dana Perimbangan	424 515 719	436 405 378	491.280.667
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	23 665 393	28 982 863	29.985.271
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	354 620 326	380 493 015	422.094.396
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	46 230 000	26 929 500	39.201.000
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	88 108 364	139 486 318	149.752.738
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	14 482 089	16 404 982	22.398.135
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	12 321 525	96 940 601	82.330.965
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	6 859 000	5 402 441	29.213.940
3.6. Pendapatan Lainnya	54 445 750	20 738 295	15.809.698

Tabel 24.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu
Tahun Anggaran 2009 – 2011 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	555 861 696	632 595 081	695.954.538
1. Belanja Tidak Langsung	315 871 417	407 092 868	431.722.062
1.1. Belanja Pegawai	299 572 014	379 233 786	410.975.941
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	7 843 800	21 673 226	10.940.127
1.5. Belanja Bantuan Sosial	8 122 196	5 806 318	9.544.955
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	215 000	360 438	-
1.8. Belanja Tidak Terduga	118 407	19 100	261.038
2. Belanja Langsung	239 990 279	225 502 213	264.232.525
2.1. Belanja Pegawai	30 299 747	32 459 715	48.434.891
2.2. Belanja Barang dan Jasa	70 608 978	87 561 903	119.651.194
2.3. Belanja Modal	139 081 554	105 480 595	96.146.439

Sumber : Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kota Palu

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulteng.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No.48 Palu Tlp. (0451)483611, 483613 Fax 483612

E-mail: bps7200@bps.go.id, website: <http://sulteng.bps.go.id>